

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA

Dr. Melmambessy Moses, MM

Wa Ariadi, SE., M.Si

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Sistem SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, karena dengan sistem yang telah terprogram menyebabkan data yang di input harus berdasarkan data yang seharusnya dan tidak semau masukan data dapat dilakukan sebab ada penolakan dari sistem didalam program. Proses terbitnya SP2D lebih cepat sesuai ketentuan 1 – 2 hari bahkan dapat diselesaikan 1 hari bahkan hanya beberapa jam antara 1 – 3 jam sudah bisa sampai ketangan yang berwenang (bendaharawan atau rekanan).

Hasil analisis menunjukkan (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,182 atau 18,20%, dan F ratio sebesar 0,118 yang artinya bahwa Faktor-faktor pada Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), dan Sistem Jaringan (X_3), secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan Penerbitan SP2D. (Y) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Assets Daerah. Selanjutnya koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,33 atau 33 % menunjukkan bahwa variabel dependen (Y); dijelaskan oleh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada tahap Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), Sistem Jaringan (X_3), sebesar 33,00 % sedangkan yang tidak dijelaskan sebesar 67,00 % ($1 - 33,00\%$). Penyesuaian terhadap koefisien determinasi (adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00 %, menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

Kata Kunci: *Prosedur, Pegawai, Sistem Jaringan dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana*

Pendahuluan

Latarbelakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan sebagai berikut “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dengan demikian tugas pengelolaan sumber daya keuangan daerah menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintah di daerah untuk melaksanakannya.

Untuk mewujudkan semua cita-cita tersebut diatas terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) oleh pemerintah pusat, yang diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan managerial dan informasi, data yang transparan yang dapat diketahui setiap saat oleh masyarakat. Dengan berjalannya waktu maka pemerintah Provinsi Papua telah menggunakan sistem informasi keuangan yang disebut dengan

SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan sistem jaringan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Sumber informasi untuk sistem ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan serta dapat meminimalisasikan keterlambatan serta mengurangi tingkat kesalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan yang dibutuhkan termasuk penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBD. Selanjutnya prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki standart misalnya (a) berdasarkan suatu strategi planning, dan (b) Anggaran berbasis kinerja. Didalam pelaksanaan anggaran daerah harus dilandasi oleh *good governance* dan manajemen keuangan efisiensi (*cash management efficiency*). Untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah di Provinsi Papua, Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu bagian pembukuan, bagian anggaran, bagian perbendaharaan dan bagian verifikasi menjadi sentral dalam pengontrolan sejak mulai dari pengajuan sampai pada penetapan, dan salah satu jenis pekerjaan yaitu penerbitan surat perintah membayar (SPM) ditangani oleh bagian perbendaharaan, baik untuk pembelajaran rutin maupun pembangunan.

Landasan Teori

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Robert G. Murdick (1989:109) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan dan diperoleh kembali (diproses) bagi keputusan (output) mengenai perencanaan, pengoperasian dan pengawasan.

Sesuai dengan maknanya maka istilah sistem informasi manajemen harus ditinjau dengan pendekatan sistem, dimana proses informasinya dilihat sebagai total sistem yang dapat dipergunakan:

- 1). Untuk perencanaan strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan.
- 2). Untuk perencanaan Taktik dan pengambilan keputusan.
- 3). Untuk perencanaan operasional, pengambilan keputusan dan pengawasan.
- 4). Untuk proses transaksi, tanggapan terhadap pemeriksaan.

Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah

Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebuah kehidupan dengan kompleksitas dan heterogenitas problematika yang tercakup didalamnya. Kompleksitas ini memerlukan sebuah bentuk penanganan dan pengelolaan kehidupan yang memerlukan pemikiran dan kemampuan manajemen yang strategik. Dalam proses mengarahkan program kegiatan yang sesuai dengan acuan peraturan yang telah disepakati, maka diperlukan sebuah struktur pembiayaan yang efisien dengan hasil yang maksimal, yakni pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, adil dan tanpa ada diskriminasi. Tujuan pembangunan dibidang ekonomi adalah pencapaian tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah dapat turut campur tangan secara efektif maupun secara pasif. Campur tangan pemerintah dalam pencapaian kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang harus tergambar dengan jelas dalam pengelolaan keuangan dan anggaran Negara/daerah tersebut.

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pertanyaan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara/daerah yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan pengelolaan anggaran yaitu:

- a) (a).Kesejahteraan masyarakat: bahwa dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran kemudian dapat tercipta ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- b) (b).Membuka kesempatan kerja: dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik dan alokasi secara tepat dengan obyek-obyek vital akan menarik tenaga kerja (*investor*). Membuka lapangan kerja sehingga distribusi anggaran kepada para pekerja, hal ini dapat meningkatkan

daya beli masyarakat yang tinggi, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai.

- c) (c). Mengurangi penganggura: efektifitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lapangan pekerjaan baru.
- d) (d).Pelayanan masyarakat: indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik, tingkat kepuasan optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

Keuangan Daerah (2006:28) adalah semua hak dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola dengan 4 (empat) prinsip yaitu:

- 1) Prinsip Kemandirian; prinsip ini mengarah kepada pengelolaan anggaran yang dikelola dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber keuangan yang bersifat pragmatis datang dari atas, tanpa ada usaha dan perlakuan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber penerimaan baru, optimalisasi sumber daya daerah, peningkatan kualitas sumberdaya yang ada, sehingga akan mendorong perbaikan produktivitas yang akan mengarah pada perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Prioritas: penggunaan skala prioritas objek-objek dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Adanya indikator dalam menentukan pilihan objek yang terbaik dari alternatif yang baik (*best of the best*).
- 3) Efisiensi, efektifitas dan ekonomi; efisiensi adalah input yang digunakan dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Efektifitas adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dan ekonomis adalah penghematan input untuk mendapatkan output yang baik, karena semua input dibiayai dengan murah.
- 4) Disiplin Anggaran; penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. APBD merupakan ilustrasi yang digunakan dalam memberikan gambaran bagaimana pembangunan dilaksanakan dalam suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) instrumen dalam melaksanakan pembangunan di daerah yaitu:

- 1). Pengelolaan keuangan daerah: merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas atau sistem keuangan daerah dengan sejumlah sub sistem yang ada didalamnya, antara lain:

- (a). Belanja Aparatur, terdiri dari beberapa jenis belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan (BOP), belanja modal.
 - (b). Belanja pelayanan Publik, terdiri dari belanja Administrasi Umum (BAU), belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), Belanja Modal, Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak disangka.
 - (c). Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah dan Pemakaian Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah.
 - (d). Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil Pajak/bukan Pajak, DAU, DAK dan bantuan keuangan dari Provinsi.
 - (e). Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu dari bantuan Dana Kontjensi atau Penyeimbangan dari Pemerintah dan Dana Darurat.
- 2). Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur ; pada bagian ini menggunakan indikator sbb:
- (a). Pembangunan Bidang Agama, merupakan landasan moral, spritual dan etika yang semakin baik serta meningkatkan mutu pendidikan agama dalam proses pembangunan, hal ini untuk menjaga dan mempertahankan strategi dan kebijakan pembangunan.
 - (b). Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yang meliputi beberapa program pembangunan kepada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah, kemudian masing-masing program tersebut dijabarkan ke dalam sasaran, arah kebijakan, dan program indikatif.
 - (c). Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah Daerah, mengacu kepada terwujudnya aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan/anggaran daerah.
 - (d). Peningkatan Daya Beli, bertambahnya pendapatan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.
 - (e). Peningkatan derajat Kesehatan dan Gizi, meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan/meningkatnya status gizi balita meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (2008:36).
- 3). Pengembangan Prasarana dan Sarana pembangunan yang mencakup beberapa hal berikut ini:
- (a). Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai dan efektif berdasarkan analisis kebutuhan daerah.
 - (b). meningkatnya kualitas pelayanan.

- (c). Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa guna menunjang percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.
- (d). meningkatnya pemanfaatan sumber daya air yang lebih efisien, efektif secara adil dan merata dalam tatanan pengelolaan sumber-sumber air yang tangguh.

Dalam rangka memberikan arah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah untuk keseimbangan sub-sub belanja antara porsi belanja Rutin dan porsi Belanja pembangunan yang merupakan ilustrasi dan arah Pengelolaan Anggaran (2006:30)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *explanatory*, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh factor-faktor penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang terdiri dari, Prosedur, Staf Pengelola dan Sistem Jaringan. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS *for window* versi 20.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1). Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui tehnik wawancara langsung kepada staf pengelola, bendaharawan dan rekanan.
- 2). Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dalam bentuk dokumen-dokumen dari Pemerintah Provinsi Papua yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 3). Studi Kepustakaan yaitu kajian terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang berjumlah 87 orang. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini 87 orang.

Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1983:94) apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengambil sampel hanya yang berhubungan langsung dengan penerbitan surat pencairan dana yaitu berjumlah 46 orang.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

1. Kuisioner
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner secara langsung

kepada para responden. Kuesioner tersebut merupakan angket tertutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data pribadi responden dan bagian kedua yang digunakan untuk mendapatkan data tentang instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala dengan nilai atau skor 1-5 misalnya untuk kategori pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S) dan sangat setuju (ST)

2. Kepustakaan

Kepustakaan adalah pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang pandangan para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini baik yang bersumber dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah maupun peraturan perundang-undangan guna memperkuat kajian dalam penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Dari data hasil penelitian tersebut diatas kemudian di analisis dengan alat statistik yang terdiri sebagai berikut :

1. Statistik deskriptif; untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian ini (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, unit kerja) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian . penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata dan standar deviasi .
2. Uji kualitas data; menurut hair et al., (1998) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dapat di evaluasi melalui uji reabilitas dan validitas. Pengujian tersebut masing-masing adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Dalam rangka mengukur kualitas data terdiri dari 3 (tiga) prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:
Asumsi klasik; terdapat empat bentuk dalam pengujian asumsi klasik, dalam penggunaan

model regresi. asumsi tersebut terdiri dari pengujian multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan keempat bentuk pengujian dari sumsi klasik dalam proses pengolahan data penelitian.

Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerbitan SP2D

X1 = Prosedur

X2 = Pegawai

X3 = Sistem Jaringan

b₁, b₂, b₃ = Konstanta dan koefisien regresi

E = error

Hasil Analisis dan Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini maka, hasil analisis data yang dilakukan berdasarkan statistik deskriptif dan regresi berganda adalah sebagai berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menguji hipotesis penelitian maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis data melalui teknik analisa statistik regresi berganda. Karena model analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini, maka sebelum model tersebut digunakan untuk menguji hipotesis perlu dilakukan pengujian beberapa asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent. Menurut (Ghozali, 2005:93), deteksi adanya multiko dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dari variabel independent. Ketentuan, jika nilai *tolerance* dari variabel independent kurang dari 0,10 atau 10 % maka terdapat multikolonieritas, jika terjadi sebaliknya maka tidak ada multikolonieritas.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.252	56.466		3.947	.000		
Prosedur	.054	.099	.058	.301	.765	.731	1.368
Staf Pengelola	.044	.156	.035	.825	.414	.891	1.098
Jaringan	..026	.141	.023	.126	.836	.911	1.298

a. Dependent Variable : Penerbitan SP2D

Hasil perhitungan di atas, menunjukkan tidak ada variabel independent yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana semua

variabel bebas (independen) yang ditetapkan dalam penelitian ini yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) antara 1.098 – 1.368. Artinya penggunaan indikator dari variabel yang ditetapkan tidak ada yang sama atau tidak ada multikolonieritas antara variabel independent dalam model regresi ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya korelasi yang kuat antar variabel independen dengan variabel dependen, maka uji multikolinearitas dilakukan dengan cara mendiagnosa perubahan pada

koefisien regresi berganda (multiple R), koefisien determinasi (R^2), dan standard error melalui analisis regresi. Matriks interkorelasi variabel-variabel penelitian pada tingkat signifikansi alpha (α) = 5% (lampiran 5), ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Matriks Interkorelasi Variabel

Correlations		Y	X1	X2	X3
Pearson	Y	1,000	-,102	-,076	,118
Correlation	X1	,076	1,000	,472	,153
	X2	,047	,472	1,000	,244
	X3	-,036	,153	,040	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,256	,312	,223
	X1	,312	.	,001	,078
	X2	,223	,125	.	,392
	X3	,380	,001	,078	,055
	N	44	44	44	44

Sumber: Hasil analisis statistic

Jika masuknya satu variabel independen tidak menyebabkan turunnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dan naiknya standard error, berarti variabel independen yang masuk dalam persamaan regresi tidak menyimpang dari asumsi multikolinearitas.

Analisis hasil regresi akan melengkapi hasil-hasil pembahasan sebelumnya dengan mengkaji pengaruh

faktor-Faktor Keterlambatan SPM yang terdiri dari Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), Sistem Jaringan (X_3) dalam mempengaruhi Penerbitan SP2D (Y). Berikut ini, disajikan statistik deskriptif untuk semua variabel dengan jumlah N serta hasil regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Konstanta (b_0)	23.252
Multiple R	,172
R Square (R^2)	,031
Adjusted R Square	,084
F Hitung	,238

Sumber : Analisis Data

Sebagaimana angka-angka pada tabel 4.4 dan 4.5, maka dapat disusun persamaan penelitian ini sesuai regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 23.252 + 054 X_1 + 026 X_2 + 0,44 X_3$$

Persamaan ini menggambarkan bahwa apabila salah satu variabel independen (X) berubah sebesar 1 unit, sedangkan variabel X lainnya konstan, maka maksimum perubahan Y adalah sebesar nilai koefisien regresi (b_i) dari X tersebut.

Dengan menduga bahwa Penerbitan SP2D (Y).dalam pengelolaan keuangan di Biro Setda Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai instansi yang memiliki tugas pengelolaan Keuangan Daerah baik dalam Prosedur (X_1), Staf Pengelola (X_2), Sistem Jaringan (X_3) mempengaruhi Penerbitan SP2D (Y) Hasil analisis regresi berganda dengan cara memecahkan variabel bebas X_1, X_2, X_3 . menunjukkan pengaruhnya terhadap Penerbitan SP2D (Y) sebagaimana dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Analisis Regresi

Variabel Penelitian	Regresi (enter method)			
	Koef. Regresi (B)	SE	t_{hitung}	Sig. T (p)
Konstanta	23.252	6,466	3,497	0,000
X_1	0,044	0,148	0,541	0,765
X_2	0,129	0,156	0,301	0,414
X_3	0,026	0,127	0,208	0,836
F ratio			0,118	0,923
Multiple R			0,182	
R Square (R^2)			0,33	
Adj. R Square			-0,94	

Sumber: Hasil analisis statistik

Hasil analisis regresi metode enter menunjukkan bahwa koefisien regresi berganda (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,182 atau 18,20%, dan F ratio sebesar 0,118 pada tingkat signifikansi $p < 0,05$, menunjukkan bahwa Faktor-faktor pada tahap

Prosedur (X_1), Staf Pengelola (X_2), dan peralatan (X_3), secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan Penerbitan SPM. (Y) dalam lingkungan SETDA Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Biro Keuangan. Selanjutnya

koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,33 atau 33 % menunjukkan bahwa variabel dependen (Y; dijelaskan oleh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi SP2D pada tahap Prosedur (X_1), Staf pengelola (X_2), peralatan (X_3), sebesar 33,00 % sedangkan yang tidak dijelaskan sebesar 67,00 % (1–33,00%). Penyesuaian terhadap koefisien determinasi (adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00 %, menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah pokok dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) ini sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat karena dengan penyelesaian pekerjaan secara manual biasanya sampai 3-7 hari, namun dengan adanya system ini pekerjaan dapat diselesaikan selama 1 hari bahkan dalam waktu jam 1-3 jam penerbitan Surat perintah Pencairan Dana dapat diselesaikan asalkan jaringan koneksi tidak terganggu.
2. SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, karena dengan sistem yang telah terprogram menyebabkan data yang di input harus lebih jelas dan akurat sebab jika pengiputan data tidak akurat maka akan terjadi penolakan dari system.
3. SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan kinerja keuangan sektor publik agar Akuntabel dan Transparans.

SARAN

Saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi kepentingan operasional guna mengevaluasi penerapan sistem SIMDA untuk mewujudkan kinerja keuangan berbasis kinerja dalam penerbitan SP2D adalah:

- a. Peningkatan ketrampilan staf pengelolaan dalam pengoperasian sistem guna mendukung pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat, efektif, efisien perlu terus di tingkatkan.
- b. Sistem Jaringan untuk wilayah Papua yang tidak bisa diprediksi maka perlu diantisipasi dengan model dan jaringan non telkomsel.

Daftar Pustaka

- Abdul H. 2001, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*". Salemba Empat. Jakarta.
- _____. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YPKN: Yogyakarta
- Devas, N. 1989. *Finansial Local Government in Indonesia*. Center for Internasional Studies Ohio University, Ohio.
- Prasetya Edy Gede, 2004. *Penyusunan Dana Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.;
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Manajemen Keuangan Daerah*, fakultas Ekonomi UNHAS Makassar
- Arsyad Nurdjaman. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* Rajawali Press. Jakarta.
- Simamora, H. 2002. *Akuntansi, Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jilid II. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000
Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah